



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

**SIARAN PERS
No. 239/SES.M.PANGAN/SP/6/2026**

**Perkuat Tata Kelola MBG, Pemerintah Fokus
Pada Kualitas Layanan dan Penguatan Pengawasan**

Jakarta, 11 Juni 2026 — Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi terkait perbaikan implementasi tata kelola penyelenggaraan Program MBG yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menyampaikan bahwa hingga 10 Juni 2026, Program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah, sementara sebanyak 1.897 SPPG dilakukan penghentian sementara (*suspend*) sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penegakan standar tata kelola program.

“Program MBG kebijakan Presiden yang sangat baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Presiden mendengar kritikan dan masukan dan mengambil langkah penataan, termasuk mengambil manajemen baru. Untuk hal yang baik diteruskan dan yang tidak baik segera diperbaiki, seperti laporan terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal sejumlah 21.000 SPPG, namun saat ini ada terdapat 27.877 SPPG, sehingga ada pembengkakan sebesar 6.877 titik SPPG. Maka dapat dihitung dalam 1 bulan terdapat pemborosan sebesar 1 Triliun. Ini perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan” Ujar Menko Bidang Pangan

Dalam rangka perbaikan program MBG, perlu dilakukan *refocusing* agar penerima manfaat tepat sasaran. Sekolah-sekolah dengan kondisi baik dan tergolong mampu juga akan dievaluasi kembali kebutuhan penerimaan MBG-nya.

Dalam rangka memperkuat tata kelola program, pemerintah juga telah menetapkan satu Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) tentang Tim Koordinasi serta lima peraturan BGN yang menjadi pedoman utama dalam evaluasi SPPG yang telah beroperasi sekaligus menjadi dasar dalam penetapan status suspend bagi SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, pemerintah tengah menyelesaikan rancangan regulasi terkait pelaksanaan Program MBG di lokasi prioritas, termasuk wilayah terpencil yang dapat memanfaatkan kantin sekolah sebagai sarana layanan. Pemerintah juga sedang memfinalisasi aturan mengenai pemanfaatan sumber pendanaan lain seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, hibah, dan skema pendanaan non-APBN untuk mendukung keberlanjutan program.

“Untuk wilayah 3T menjadi perhatian utama kita, terdata terdapat 2.023 titik, namun membengkak jadi 8.617, total pembengkakan sebesar 6.138 titik itu sudah terdapat SK dari BGN, ini merupakan temuan yang lebih detail dan harus segera ditata. Dalam satu bulan ini kita akan *refocusing*, untuk memastikan penerima manfaat, kita akan fokus pada wilayah 3T serta kita juga akan mengutamakan perbaikan kualitas dapur, terutama keamanan pangan dan kebersihan, kita *zero tolerance*” Sambung Menko Pangan.

Untuk mendukung pengawasan dan respons yang lebih cepat terhadap berbagai dinamika pelaksanaan program, diperlukan dukungan seluruh kementerian dan lembaga dalam optimalisasi *Call Center* di Badan Gizi Nasional serta operasionalisasi Pusat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui integrasi data dan penempatan tenaga teknis guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi Program MBG secara nasional.

Menko Bidang Pangan menegaskan bahwa tata kelola SPPG harus mengambil *supplier* bahan baku dari desa setempat, bisa dari Kopdes, BUMDes, UMKM, maupun usaha lainnya “atas perintah Presiden SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat.” Tutup Menko Bidang Pangan.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Narahubung.

Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan